

Departemen Pendidikan Nasional
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1
Kampus Gedongmeneng Bandar Lampung

**EFISIENSI ALOKASI PENGELUARAN SEKTOR
PERTANIAN DAN KONTRIBUSINYA PADA PENINGKATAN
PDRB SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Disusun Oleh

Nama	: Selvi Aryani
NPM	: 0541021055
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	: Ekonomi Publik dan Fiskal
Dosen Pembimbing 1	: Yourni Atmaja, S.E.
Dosen Pembimbing 2	: Muhammad Husaini, S.E., M.P.



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS LAMPUNG
2010**

ABSTRAK

EFISIENSI ALOKASI PENGELUARAN SEKTOR PERTANIAN DAN KONTRIBUSINYA PADA PENINGKATAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

Selvi Aryani

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah efisiensi dana APBD Sektor Pertanian dalam peningkatan PDRB Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun anggaran 2004-2008?. Tujuan penulisan ini adalah : Untuk mengevaluasi tingkat efisiensi alokasi dana APBD Sektor Pertanian Propinsi Lampung tahun Anggran 2004-2008 dalam mendorong peningkatan PDRB Sektor pertanian Propinsi Lampung.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu menganalisa berdasarkan analisis efisiensi. Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Dikategorikan efisien, apabila analisis yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil analisis ini, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya.

Hasil analisis menunjukkan kinerja pemerintahan daerah adalah baik, karena analisis efisiensi tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar 36,23 persen dn 41,76 persen dalam kinerja keuangan berada dibawah 60 persen dan dikategorikan sangat efisien, tahun 2006 sebesar 76,98 persen dikategorikan efisien karena dalam kinerja keuangan berada diantara 60-80 persen sedangkan tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 94,08 persen dan 91,72 persen dalam kinerja keuangan diantara 90-100 persen dikategorikan kurang efisien, rata-rata sebesar 68,15 persen dalam kinerja keuangan berada diantara 60-80 persen dapat dikategorikan efisien. Terlihat jelas bahwa efisiensi alokasi pengeluaran sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Provinsi Lampung setiap tahunnya adalah baik, dengan naiknya pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Hal ini bearti alokasi Anggaran pengeluaran sektor pertanian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) makin efisien.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menunjukkan kinerja keuangan sektor pertanian alah baik. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung dari tahun ketahun dengan rata-rata peranan sebesar 42,47 persen pertahun. Hal ini menunjukkan stabilnya jumlah penerimaan yang diperoleh dari sektor pertanian dalam perannya terhadap Pendapatan Domestik Regioal Bruto (PDRB) Provinsi Lampung.

Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini adalah sebaiknya anggaran yang ada harus berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. Maksudnya pengeluaran-pengeluaran tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan harapan mampu meningkatkan PDRB sektor pertanian sehingga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 03 Januari 1987, merupakan anak ke-3 dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Abdullah Sani dan Ibunda Ervina, S.Pd.

Jenjang pendidikan Formal yang ditempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak Taruna Jaya, Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1993, Sekolah Dasar AL-Azhar Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung, kembali diselesaikan pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Umum YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.

MOTTO

Keindahan adalah keindahan budi pekerti.

Kebaikan adalah santunnya tata krama.

Dan keelokan adalah kecerdasan akal.

(Dr. 'Aidh al-Qarni)

Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesukaran.

(QS. Ath-Thalaq:7)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai

dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.

(QS. Alam Nasyrah; 6-7)

PERSEMBAHAN

Dengan lafadz hamdallah, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

Allah Rabbil Izzati atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kasih sayang dan pertolongan yang diberikan-Nya padaku.

Ayah dan Ibu, yang dengan segenap kasih sayang, kesabaran, dan nasehatnya dalam membesarkan dan mendidikku, atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kebahagiaanku, serta tetes peluh yang telah dikeluarkan untuk mendukung dan menyelesaikan pendidikanku.

Kakak-Kakakku (Ayunda Nida dan Oti Oni) dan adikku Ilham yang selalu menyayangiku dan mendukungku serta menghargaiku sebagai saudara juga teman.

Orang-orang yang turut memberikan andil bagiku dalam memahami arti hidup dan bagaimana menjalani kehidupan. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.

Almamaterku tercinta.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkah rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan *judul "Efisiensi Alokasi Pengeluaran Sektor Pertanian dan Kontribusinya Pada Peningkatan PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Lampung"* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan yang sangat berguna hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Bapak Muhammad Husaini S.E., M.EP., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di Universitas Lampung;
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., selaku Pembimbing Akademik;
4. Bapak Yourni Atmaja, S.E., selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Muhammad Husaini S.E., M.EP., selaku Pembimbing Kedua atas kesediannya untuk memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Para Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, terimakasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama dalam pendidikan;
7. Para staf administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
8. Yang terhormat Ayah dan Bunda tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan penulis meraih cita-cita, terimakasih atas doa dan dukungannya;
9. Kakak-kakakku tersayang ayunda nida dan otih oni, dan adikku ilham terimakasih atas dukungan dan bantuan doanya. (Semoga kita bisa meraih masa depan yang cerah dan membahagiakan Ayah dan Ibu, amin);
10. Sahabat-sahabat terbaikku Uun, Eva, Evi, Siska, Giska, Fitri, Yunia, terima kasih atas persahabatan dalam suka dan dukanya.
11. Teman-temanku di jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2005 Anggi, Hilyati, Lena, Leni, Novi, Sinta, samuel, satria, maaf bagi teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih atas canda dan tawanya.

Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, Mei 2010

Selvi Aryani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I PENDAHULUAN	
	1
A Latar Belakang.....	1
B Permasalahan.....	11
C Tujuan Penulisan.....	11
D Kerangka Pemikiran.....	12
E Sistematika Penulisan.....	15
II TINJAUAN PUSTAKA	16
A Pengeluaran Pemerintah.....	16
1. Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	16
2. Fungsi dan Peranan Pemerintah.....	18
3. Pengertian APBD.....	19
B Kinerja Keuangan.....	21
C Pengertian Efisiensi.....	22
D Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	23
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	24
2. PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	26
3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	27
4. PDRB Menurut Dasar Harga Konstan.....	27
5. PDRB Atas Dasar Harga Produksi.....	27
6. PDRB Atas Dasar Harga Pasar.....	28
7. PDRB Perkapita.....	28
E Tanaman Komoditas Pertanian.....	28

III METODE PENELITIAN.....	30
A Jenis dan Sumber Data.....	30
B Metode Pengumpulan Data.....	31
C Alat Analisis.....	31
D Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	32
1. Letak Geografis dan Keadaan Ekonomi.....	32
2. Keadaan Penduduk Provinsi Lampung.....	35
3. Potensi Ekonomi.....	36
IV PEMBAHASAN.....	38
A Efisiensi Alokasi APBD Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian.....	38
B Langkah-langkah Meningkatnya Efisiensi APBD Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian	43
C Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung.....	44
D Kinerja Produksi Tanaman Pangan Pertanian Provinsi Lampung.....	46
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
A Kesimpulan.....	47
B Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Penggunaan Anggaran Pengeluaran Provinsi Lampung Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004-2008.....	4
2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2004-2008 Menurut Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah).....	6
3. Perkembangan Hasil Produksi Tanaman Pangan Sektor Pertanian Propinsi Lampung Periode Tahun 2004-2008 Dengan Rincian Perkomoditi (Ton).....	8
4. Tingkat Penyediaan Konsumsi Pangan Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2004-2008.....	9
5. Kriteria Kinerja Keuangan.....	21
6. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2004-2008.....	35
7. Hasil Perhitungan nilai Efisiensi Alokasi APBD Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2004-2008.....	39
8. Peranan Hasil Efisiensi Pengeluaran Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008.....	41
9. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2004-2008.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perkembangan Hasil Produksi Tanaman Pangan Sektor Pertanian Provinsi Lampung Periode Tahun 2004-2008 dengan Rincian Perkomoditi (Ton)
- Lampiran 2 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2004-2008
- Lampiran 3 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun Anggaran 2004-2008 (Juta Rupiah)
- Lampiran 4 : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004
- Lampiran 5 : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan dinamis yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju pada suatu keadaan yang lebih baik dari satu tahap ke tahap berikutnya. Agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik diperlukan adanya dukungan yaitu dana yang mencukupi dan sumber daya yang berkualitas. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan adalah pemerintah.

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk membiayai pembangunan harus digunakan secara terarah dan terkendali agar pengalokasiannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2000 : 169). Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Secara garis besar, pengeluaran negara dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah.
- b. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan (sektor-sektor)
(Marselina 2006 : 39).

Anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah, salah satu aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai sektor diantaranya sektor pertanian. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah direncanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variabel yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dalam anggaran (*budget*) yang bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh karena itu usaha pembangunan harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan. (M. Suparmoko, 1999:49).

Sebagai daerah otonomi, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah terlaksana secara efisien dan efektif maka dibuat aturan mengenai pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004). Peranan pemerintah diharapkan semakin besar dalam mengatur jalannya perekonomian modern, menurut Musgrave (dalam Guritno Mangkoesoebroto, 2000 :2) ada tiga golongan besar peranan pemerintah dalam perekonomian yaitu :

1. Peran Alokasi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar pengalokasian sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Peran Distribusi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan (khususnya) merata di tengah masyarakat.
3. Peran Stabilisasi, yaitu peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada.

Termasuk pada sektor pertanian yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Alokasi Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tertuang pada setiap tahunan. Pertanian Indonesia adalah pertanian yang tropika, karena sebagian besar daerahnya berada didaerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis katulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Indonesia masih merupakan Negara Pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional.

Besarnya Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung untuk APBD sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1: Persentase Penggunaan Pengeluaran Daerah Provinsi Lampung Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004-2008.

Tahun	Pengeluaran Provinsi Lampung (Rp)	Pengeluaran Sektor Pertanian (Rp)	Persentase (%)
2004	751.108.751.000	7.891.425.449	1,15
2005	865.266.187.000	15.983.711.380	1,85
2006	1.294.948.833.000	27.034.888.514	2,11
2007	1.532.401.692.000	35.282.200.607	2,30
2008	1.711.015.164.000	36.968.663.064	2,21
Rata-rata			1,92

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2009

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase dana realisasi pengeluaran daerah Propinsi Lampung untuk sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2004-2007 persentase dana pengeluaran Propinsi Lampung untuk sektor pertanian mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2008 persentase pengeluaran sektor pertanian mengalami penurunan dengan persentase pengeluaran sebesar 2,21 persen. Rata-rata alokasi dana pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 1,92 persen, dalam lima tahun ini digunakan untuk meliputi kegiatan sektor pertanian, yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau harga konstan.

Propinsi Lampung sedang berupaya mengerahkan kemampuan dan memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, guna meningkatkan kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Target yang hendak dicapai sektor pertanian adalah selalu meningkatnya hasil pertanian yang dapat meningkatnya pula laju pertumbuhan ekonomi Propinsi

Lampung, yang diukur lewat besarnya PDRB setiap tahunnya. Pendapatan Regional yang dihitung menurut harga konstan (*Constan price*) akan memberikan gambaran besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara riil. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi. Pendapatan Regional atas dasar harga konstan dapat pula digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor antar daerah akan dapat pula mengukur kemajuan yang telah dicapai setiap daerah (Biro Pusat Statistik, 2007).

Sektor Pertanian merupakan sektor andalan Propinsi Lampung karena sektor ini memberikan sumbangan yang paling besar dalam pembentukan PDRB Lampung. Sektor Pertanian terbagi menjadi lima subsektor yaitu subsektor Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan subsektor perikanan.

Besarnya dana yang dikeluarkan daerah untuk sektor pertanian Propinsi Lampung tentunya berpengaruh juga pada penghasilan produksi pertanian. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian selama kurun waktu lima tahun dari tahun anggaran 2004-2008 dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dibelakang ini.

Tabel 2: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2004-2008 Menurut Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Sektor Pertanian (Rp)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)
2004	11.951.916	-
2005	12.509.837	4,67
2006	13.184.537	5,39
2007	13.912.097	5,52
2008	14.528.048	4,42
Rata-rata pertumbuhan		4,00

Sumber : Biro Pusat Statistik Propinsi Lampung Tahun 2009

Pada Tabel 2 memperlihatkan Laju Pertumbuhan nilai PDRB Sektor Pertanian Propinsi Lampung yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 4,00 persen pertahun. Selama kurun waktu tahun 2004-2008 pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 5,52 persen. Dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 4,42 persen.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya, perlu sadari bahwa perubahan nilai pendapatan yang berlaku dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. Perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi.
2. Perubahan dalam harga – harga (Sadono Sukirno, 1985 : 19).

Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya berlaku dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan ini pengaruh perubahan harga – harga terhadap nilai pendapatan nasional pada berbagai tahun harus dihapuskan. Hal ini

dilakukan untuk menghitung pendapatan nasional menurut harga konstan (Sadono Sukirno, 1985 : 21).

Program Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Peningkatan Ketahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik (jumlah dan mutu), aman, merata, dan terjangkau. Ketersedianya pangan dalam jumlah yang cukup ditingkat rumah tangga merupakan syarat keharusan untuk tercapainya ketahanan pangan, tentu saja hal tersebut belum cukup. Syarat keharusan tersebut perlu diikuti dengan syarat kecukupan, dalam hal ini adalah pangan tersebut harus bermutu, aman, merata dan terjangkau.

Sasaran yang ingin dicapai dalam sektor pertanian adalah (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional, dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal ; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat ; (3) serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Hasil produksi tanaman pangan sektor pertanian Propinsi Lampung periode tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 4 dibelakang ini.

Tabel 3 :Perkembangan Hasil Produksi Tanaman Pangan Sektor Pertanian Propinsi Lampung Periode Tahun 2004-2008 Dengan Rincian Perkomoditi (Ton)

Tanaman Pangan	Tahun					Rata-rata (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	
	Produksi (%)	Produksi (%)	Produksi (%)	Produksi (%)	Produksi (%)	
Padi	101,94	98,42	98,10	101,22	95,64	99,06
Jagung	87,28	113,95	91,76	88,74	115,48	99,44
Kedelai	44,56	50,68	46,13	46,20	93,75	56,26
Kc. Tanah	84,84	75,99	96,71	85,36	89,18	86,42
Kc. Hijau	82,61	79,95	73,34	69,36	64,74	74,00
Ubi Kayu	113,79	88,52	102,36	105,86	130,28	108,16
Ubi Jalar	106,78	93,67	88,17	77,02	85,25	90,18

Sumber : Dinas Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2009

Tabel 3 memperlihatkan hasil produksi tanaman pangan dengan 7 macam komoditas tanaman pangan menunjukkan rata-rata hasil produksi tanaman pangan sektor pertanian pada kurun waktu lima tahun dari tahun 2004-2008, dimana produksi tanaman pangan terbesar adalah ubi kayu dengan rata-rata produksi 108,16 persen dan diikuti oleh tanaman jagung sebesar 99,44 persen, padi 99,06 persen, ubi jalar 90,18 persen, kacang tanah dan kacang hijau masing-masing sebesar 86,42 persen dan 74,00 persen. Sedangkan hasil produksi tanaman pangan terkecil kedelai dengan rata-rata produksi sebesar 56,26 persen.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah : “ terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau”. Penyediaan konsumsi pangan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat Lampung agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan tidak kekurangan pangan, komoditas-komoditas tersebut antara lain berupa beras, jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan. Penyediaan

konsumsi tersebut dapat dilihat dalam periode lima tahun belakangan ini, dimana jumlahnya selalu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya produksi pangan yang diproduksi setiap tahunnya. Penyediaan konsumsi pangan (beras, jagung, dan ubi kayu) mengalami surplus sebagaimana terlihat pada Tabel 5 berikut ini.

Table 4 :Tingkat Penyediaan Konsumsi Pangan Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2004-2008.

No.	Komoditas	Penyediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus (Ton)	Minus (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Tahun 2004				
1.	Beras	1.205.077	835.101	369.975	-
2.	Jagung	1.075.843	114.044	961.799	-
3.	Kedelai	5.361	48.412	-	13.051
4.	K.Tanah	11.914	27.664	-	15.750
5.	K.Hijau	5.255	6.916	-	1.661
6.	Ubikayu	4.384.008	672.092	3.711.915	-
7.	Ubijalar	39.134	20.886	18.248	-
8.	Sayuran	-	454.378	-	454.378
9.	Buah	-	22.460	-	225.460
II.	Tahun 2005				
1.	Beras	1.143.467	843.572	299.895	-
2.	Jagung	1.094.428	115.201	979.227	-
3.	Kedelai	5.016	48.903	-	43.887
4.	K.Tanah	11.068	27.944	-	16.876
5.	K.Hijau	4.599	6.986	-	2.387
6.	Ubikayu	4.225.076	678.910	3.546.166	-
7.	Ubijalar	39.767	21.098	18.669	-
8.	Sayuran	-	458.987	-	458.987
9.	Buah	-	227.747	-	227.747
III.	Tahun 2006				
1.	Beras	1.209.060	941.693	227.408	-
2.	Jagung	1.221.180	19.759	1.201.421	-
3.	Kedelai	3.802	49.397	-	45.595
4.	K.Tanah	12.290	9.738	2.552	-
5.	K.Hijau	4.440	5.033	-	593
6.	Ubikayu	4.396.488	144.520	4.251.963	-
7.	Ubijalar	39.135	40.089	-	954
8.	Sayuran	151.943	128.212	23.731	-
9.	Buah	78.002	53.633	24.368	-
IV.	Tahun 2007				
1.	Beras	1.688.098	1.114.692	537.406	-
2.	Jagung	1.211.023	26.759	1.184.264	-
3.	Kedelai	3.448	49.751	-	46.303

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	K.Tanah	13.302	10.244	3.058	
5.	K.Hijau	4.424	5.133	-	709
6.	Ubikayu	4.984.675	238.616	4.746.059	-
7.	Ubijalar	42.739	39.135	3.604	-
8.	Sayuran	10.448	340.072	235.591	-
9.	Buah	90.365	62.487	27.878	-
V.	Tahun 2008				
1.	Beras	1.662.616	1.106.951	555.665	-
2.	Jagung	1.594.979	68.737	1.526.242	-
3.	Kedelai	50.751	7.730	-	43.021
4.	K.Tanah	16.302	12.912	3.390	-
5.	K.Hijau	3.950	5.607	-	1.657
6.	Ubikayu	6.806.207	654.765	6.151.442	-
7.	Ubijalar	66.221	65.739	6.621	-
8.	Sayuran	156.254	235.108	-	78.854
9.	Buah	110.527	71.631	38.896	-

Sumber : Subdin Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, 2009

Berdasarkan Tabel 4 diatas memperlihatkan penyediaan konsumsi pangan pada komoditas beras, jagung, ubikayu mengalami surplus pada kurun waktu lima tahun dari tahun 2004-2008. Sedangkan komoditas kedelai mengalami minus pada kurun waktu lima tahun ini. Komoditas kacang tanah mengalami minus pada tahun 2004-2005 pada tahun 2006-2008 komoditas kacang tanah mengalami surplus. Kacang hijau pada kurun waktu lima tahun ini mengalami penurunan produksi yang cukup besar. Pada komoditas ubikayu dan ubijalar mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, besarnya penyediaan konsumsi tidak sebanding dengan kebutuhan sehingga membuat ubikayu dan ubijalar mengalami kelebihan produksi.

Pada sayuran dan buah mengalami minus dikarenakan produksi yang tidak mencukupi kebutuhan yang besar, terutama pada sayuran yang tingkat kebutuhan konsumsi yang besar sedangkan buah pada tahun 2008 mengalami kenaikan produksi dibanding pada tahun 2007 yang mengalami minus.

Kecilnya persentase penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Lampung Tahun 2004-2008 untuk sektor pertanian hanya 1,92 persen saja meskipun ada kecenderungan terus meningkat, dan disisi lain tampak PDRB sektor pertanian dengan laju pertumbuhan dengan rata-rata 4,00 persen mengalami kenaikan tiap tahunnya. Oleh karena itu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilokasikan pemerintah untuk sektor pertanian apakah sudah efisien dengan apa yang dihasilkan oleh sektor pertanian, perkembangan hasil produksi tanaman pangan sektor pertanian dengan rata-rata yang tidak menentu serta tingkat penyediaan konsumsi masih ada komoditas hasil pertanian yang mengalami minus dan surplus sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam penyediaan konsumsi tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

“ Bagaimanakah efisiensi dana APBD Sektor Pertanian dalam peningkatan PDRB Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun anggaran 2004-2008”.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengevaluasi tingkat efisiensi alokasi dana APBD Sektor Pertanian Propinsi Lampung tahun Anggaran 2004-2008 dalam mendorong peningkatan PDRB Sektor pertanian Propinsi Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2000 : 169). Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Secara garis besar, pengeluaran negara dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah.
- b. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan (sektor-sektor)
(Marselina 2006 : 39).

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah terlaksana secara efisien dan efektif maka dibuat aturan mengenai pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat, yang sesuai dengan keputusan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004). Peranan pemerintah diharapkan semakin besar dalam mengatur jalannya perekonomian modern, menurut Musgrave (dalam Guritno Mangkoesoebroto, 2000 :2) ada tiga golongan besar peranan pemerintah dalam perekonomian yaitu :

1. Peran Aloksi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar pengalokasian sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Peran Distribusi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan (khususnya) merata di tengah masyarakat.
3. Peran Stabilisasi, yaitu peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada.

Peranan pemerintah yang tercemin dalam perencanaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan pendapatan daerah pada berbagai sektor ekonomi yang ada dan selanjutnya pemerintah juga harus dapat mengalokasikan pendapatan daerah tersebut untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Untuk menilai keberhasilan suatu daerah salah satu indikator yang digunakan adalah besarnya PDRB. Dalam pertumbuhan ekonomi bahwa untuk meningkatkan pendapatan perkapita daerah (PDRB) harus dilibatkan berbagai faktor produksi (sumber-sumber ekonomi) dalam setiap kegiatan produksi. Pada umumnya faktor

produksi dapat dikelompokkan menjadi faktor produksi tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam, teknologi dan faktor sosial (Suparmoko, 2002 : 100).

Nilai PDRB secara umum merupakan nilai dari keseluruhan produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu tahun. Metode penghitungan PDRB dilakukan dengan 3 (tiga) cara :

- a. Ditinjau dari segi produksi yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah keseluruhan produksi yang dicapai tiap sektor produksi yang ada dalam suatu perekonomian.
- b. Ditinjau dari segi pendapatan yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.
- c. Dari segi pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. (Sadono Sukirno, 1988 : 22)

Ketersedianya pangan dalam jumlah yang cukup ditingkat rumah tangga merupakan syarat keharusan untuk tercapainya ketahanan pangan, tentu saja hal tersebut belum cukup. Syarat keharusan tersebut perlu diikuti dengan syarat kecukupan, dalam hal ini adalah pangan tersebut harus bermutu, aman, merata dan terjangkau. Bermutu dan aman terkait dengan aspek keamanan pangan, merata mengandung implikasi perlu tersedia disetiap tempat/daerah dan waktu, dan terjangkau terkait dengan akses dan daya beli rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan.

Tingkat penyediaan konsumsi yang mengalami minus dengan kata lain besarnya kebutuhan konsumsi pangan dari pada tersedianya pangan yang dibutuhkan, dan

komoditas yang mengalami surplus dengan kata lain besarnya produksi yang disediakan sedangkan kebutuhan konsumsi kecil.

Hal ini menunjukkan ketidak efisienan dalam mengelola keuangan daerah yang dialokasikan buat sektor pertanian dalam memproduksi hasil pertanian.

Sedangkan dana APBD yang dialokasikan cukup besar tapi hasil pertanian yang di kontribusikan dalam PDRB masih belum memuaskan karena ketidakmerataan dalam penyediaan konsumsi setiap tahunnya. Walau sektor pertanian adalah penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB akan tapi masi terjadi ketidakmerataan dalam tingkat penyediaan konsumsi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I :Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan

BAB II :Tinjauan Pusaka yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB III :Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Alat Analisis dan Gambaran Umum.

BAB IV :Pembahasan

BAB V :Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengeluaran Pemerintah

1. Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah sebagai salah satu bentuk lembaga dalam masyarakat, kegiatannya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang aman, adil dan makmur. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka pemerintah menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuknya termasuk didalamnya yang berupa uang. Penggunaan uang untuk melakukan fungsi pemerintah inilah yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah.

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (2000:169) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Teori Makro, (Guritno Mangkoesoebroto, 2000:169).
”Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap

menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya”.

2. Teori Mikro, (Guritno Mangkoesobroto, 2000:177).
 1. Tujuan dari teori ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
 2. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang untuk publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah, salah satu aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai sektor diantaranya sektor pertanian. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah direncanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variabel yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dalam anggaran (*budget*) yang bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh karena itu usaha pembangunan harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan. (M. Suparmoko, 1999:49).

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor :
Perubahan permintaan akan barang publik. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor

produksi yang digunakan dalam proses produksi. Perubahan kualitas barang publik. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

Melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, peranan pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan kegiatan pemerintah ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat meningkat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan pangan, prsarana transportasi, pendidikan dan kesehatan umum.
2. Perkembangan penduduk, hal ini membutuhkan peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.
3. Perkembangan ekonomi, juga dibutuhkan peranan pemerintah yang sama besar guna mengisi kegiatan ekonomi.

2. Fungsi dan Peranan Pemerintah

Fungsi pemerintah menurut Richad A. Musgrave (dalam Guritno Mangkoesoebroto, 2000:2) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja Pemerintah, yaitu :

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*).
Yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik.
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*).
Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial

ekonomis. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh mobilitas sosial, struktur pasar, macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut.

3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*).

Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dan kestabilan nilai uang.

Kaitan dengan permasalahan fungsi atau tujuan diatas hampir selalu dijumpai pada setiap permasalahan mengenai tujuan untuk politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan perdagangan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pertanian, perburuhan, dan lain-lain.

3. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang terpenting didalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena sangat menentukan arah dan hasil pembangunan yang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai APBD, antara lain seperti dinyatakan D.J Mamesah (1995 : 20) yaitu : “Rencana Operasional Keuangan Pemerintah Daerah dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud”.

Pengertian lainnya adalah menurut J.Wayong yang dikutip oleh D.J.Mamesah (1995 : 21) yaitu : “Suatu rencana perkerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu dalam waktu mana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslog*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tadi”.

Adapun istilah yang dimaksud dalam APBD apabila diuraikan satu per satu artinya adalah sebagai berikut :

A : “Anggaran” dalam arti “*bergrooting*” atau “*estimate*” mempunyai makna “penentu”, atau “penetapan besarnya uang”.

P : “Pendapatan” atau “*inkomen*” dalam arti “*revenue*” atau penerimaan, dimaksudkan bahwa untuk membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumber penerimaan, dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak, retribusi dan lain-lain, bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan (berupa ganjaran dan subsidi) dan bantuan-bantuan pembangunan.

B : “Belanja” atau “*government expenditure*” atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimaksudkan hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran.

Sedang tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi yang antara lain berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Uang tersebut untuk keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan.

D : “Daerah” dimaksudkan sebagai daerah otonom (dalam hal ini daerah tingkat I dan tingkat II) sebagai badan hukum publik dalam bentuk organisasi yang menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah (D.J Mamesah, 1995 : 19)

B. Kriteria Kinerja Keuangan

Adapun nilai efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Hukum Wagner yang disebut dengan *Law of Ever Increasing State Activity* menjelaskan adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Jadi apabila pendapatan meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Walaupun demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut. Rumusan analisis efisiensi Pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Pengeluaran\ (belanja)}{Pendapatan} \times 100\%$$

Menurut Susanti (1995), ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat efisiensi pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Proporsi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap PDB
2. Perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
3. Komposisi pengeluaran rutin

C. Pengertian Efisiensi

Menurut H. Dasril Munir, Hendry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Efisiensi pada sektor usaha swasta (*Private sector efficiency*).
2. Efisiensi pada sektor swasta dijelaskan dengan konsep input-output, yaitu rasio dari input-output.
3. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*Public sector efficiency*)
4. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik, dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien, jika pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*), dengan biaya (*input*) yang rendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang dirugikan.

Kegagalan pemerintah daerah dalam program efisiensi pengeluaran daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengeluaran belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi jangka pendek
- c. Pemerintah daerah bersifat reaktif, tidak proaktif untuk mengeliminasi

sumber pemborosan keuangan daerah.

d. Tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya

(Mardiasmo, 2002)

D. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. perubahan nilai pendapatan yang berlaku dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. Perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi.
2. Perubahan dalam harga – harga (Sadono Sukirno, 1985 : 19).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi, serta dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan dimasa depan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang *bersifat kuantitatif (quantitative change)* dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) atau pendapatan atau output perkapita. Produk Domestik Bruto (GDP) adalah total nilai pasar dan barang – barang akhir dan jasa – jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indikator

pertumbuhan ekonomi diturunkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau harga konstan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah pada satu periode tertentu adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan riil seluruh sektor secara agregat pada tahun yang bersangkutan. Tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan merupakan pertumbuhan riil PDRB atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan regional adalah jumlah seluruh nilai netto barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam waktu tertentu atau dari segi arus uangnya adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Dalam perhitungan pendapatan nasional antara lain dilakukan beberapa konsep yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan untuk seluruh unit kegiatan ekonomi untuk membenahi kebutuhan konsumsi, investasi dan ekspor (Biro Pusat Statistik, 2007).

PDRB merupakan istilah yang sering dipakai untuk menilai tingkat produksi yang dihasilkan suatu daerah. Menurut (Dumairy 2002 : 38) perhitungan PDRB dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan produksi

Pendekatan produksi merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit yang dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi sebelas sektor atau lapangan usaha yaitu (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel, dan restoran (7) transportasi dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah semua pendapatan persektor disebut *Nilai Tambah Bruto Sektoral*, oleh karena itu PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) Pengeluaran

konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, (3) Pembentukan modal tetap bruto (4) perubahan stok, (5) Pengeluaran konsumsi pemerintah, serta (6) Ekspor netto (yaitu ekspor dikurang impor), dalam jangka waktu setahun.

Total PDRB yang dihitung melalui ketiga pendekatan diatas akan menghasilkan nilai yang sama besar. Penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan akan disajikan dalam bentuk data PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan melalui pendekatan pengeluaran disajikan dalam bentuk data PDRB menurut penggunaan. Penghitungan nilai PDRB biasanya dikelompokkan kedalam sebelas sektor lapangan usaha (sektor ekonomi), dan sejak tahun 1993 berubah menjadi Sembilan lapangan usaha.

Penyajian dari penghitungan PDRB terdapat keterangan menurut harga konstan (*base year price*) dan menurut harga berlaku (*current year price*). Perhitungan atas dasar harga konstan artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan pada tahun dasar (IHK=100) perhitungan berdasar harga konstan telah menghilangkan pengaruh harga/inflasi, sehingga dapat menunjukkan nilai riil. Sedangkan menurut dasar harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasar pada tahun yang bersangkutan hal yang berarti termasuk kenaikan harga ikut dihitung (HG. Suseno Triyanto Widodo, 1991).

2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Menurut System Of Nation Accounts (SNA) diterbitkan oleh United Nations secara makro perekonomian suatu wilayah terdiri dari tiga sektor utama ; sektor

primer, sektor sekunder, sektor tersier.

- (i) Sektor primer terdiri dari sektor pertanian, peternakan, hutan, perikanan, serta sektor pertambangan dan pengolahan.
- (ii) Sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, serta sektor bangunan dan konstruksi.
- (iii) Sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sektor jasa.

3. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah produksi, pendapatan atau pengeluaran pada tahun-tahun dasar yang bersangkutan, dengan kata lain perubahan harga ikut dihitung.

4. PDRB Menurut Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi, pendapatan serta pengeluaran atas dasar harga konstan pada tahun dasar tertentu, dengan kata lain harga tidak akan berubah, dari tahun dasar tersebut sampai tahun-tahun berikutnya.

5. PDRB Atas Dasar Harga Produksi

PDRB atas dasar harga produksi merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh usaha yang meliputi balas jasa produksi (upah, gaji, dan surplus usaha), penyusutan, pajak tak langsung netto, dan penghitungannya dilakukan atas dasar

harga berlaku atau atas dasar harga konstan.

6. PDRB Atas Dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar merupakan hasil pengurangan dari produk domestik regional bruto atas dasar harga produksi dengan penyusutan benda-benda modal tetap.

7. PDRB Per kapita

PDRB perkapita adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Statistik pendapatan regional disajikan dengan baik dan lengkap akan menunjukkan berbagai keadaan seperti PDRB harga konstan yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara menyeluruh maupun sektor-sektor dan sub sektor. Selain itu pendapatan regional secara kategori berfungsi sebagai :

- a. Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi
- b. Indikator tingkat perkembangan pendapatan perkapita
- c. Indikator tingkat kemakmuran rakyat
- d. Indikator tingkat deflasi dan inflasi
- e. Indikator tingkat struktur perekonomian daerah.

E. Tanaman komoditas Pertanian

Pendapatan petani sebagai produsen tergantung kepada besarnya produksi yang dihasilkan dan harga yang diterima. Harga yang diterima tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran serta sistem pemasaran yang berlaku. Sistem

pemasaran dikatakan efisien apabila tercipta sistem pembagian yang adil dari setiap fungsi pemasaran yang dilakukan oleh setiap lembaga yang terlibat dalam sistem sesuai dengan peran masing-masing.

Tataniaga pertanian bertujuan untuk menyampaikan produk hasil pertanian yang dihasilkan dari tangan produsen ke tangan konsumen. Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh produsen sebelum ke konsumen terlebih dahulu dipasarkan melalui lembaga-lembaga perantara yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar penerima, eksportir dan importer, pedagang besar penyalur dan pedagang pengencer serta konsumen.

Kreteria lembaga-lembaga pedagang perantara lebih ditekankan pada volume usaha dan tidak berdasarkan kepada lokasi atau wilayah administrasi pemerintah. Petani dapat menjual komoditas pertaniannya tidak saja pada pedagang pengumpul tetapi juga dapat ke pedagang besar. Begitu juga pedagang besar dan pedagang pengumpul dapat beroperasi sampai ke desa-desa maupun kecamatan. Di tingkat produsen tataniaga bertujuan untuk menentukan komoditas yang sebaiknya diproduksi, bagi pedagang perantara bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menguasai pangsa pasar sedangkan ditingkat pemerintahan bertujuan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi operasional tataniaga dengan cara menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tataniaga.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang dikeluarkan oleh instansi- instansi pemerintah Propinsi Lampung. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini mencakup data tentang :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2004-2008 yang bersumber dari Biro Keuangan Provinsi Lampung.
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pertanian Provinsi Lampung tahun anggaran 2004-2008 yang bersumber dari Biro Keuangan Provinsi Lampung.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian tahun anggaran 2004-2008 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.
4. Hasil produksi tanaman pangan sektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2004-2008 yang bersumber dari laporan tahunan dinas pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Lampung.

5. Tingkat penyediaan konsumsi pangan sektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2004-2008 yang bersumber dari laporan tahunan dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi Lampung

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi dokumentasi dan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dari laporan instansi pemerintahan, dari buku-buku literatur dan data dari sumber lainnya yang valid, setelah itu data tersebut diolah dan dihitung serta dianalisis dapat memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kuantitatif yaitu menganalisa berdasarkan analisis efisiensi. Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Dikategorikan efisien, apabila analisis yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil analisis ini, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi diri apa yang direncanakan. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Tri

Suprpto, 2007 : 60). Menghitung efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan rumusan (H.Dasril Munir, Henry Arys Djuanda & Hessel Nogi S Tangkilisan : Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah)

$$Efisiensi = \frac{Pengeluaran\ (belanja\ daerah)}{Pendapatan\ daerah} \times 100\%$$

Dimana : 1. Pengeluaran (belanja daerah) Sektor Pertanian
2. Pendapatan daerah Sektor Pertanian

Adapun Kriteria tingkat efisiensi yang diukur dalam kinerja keuangan sebagai berikut :

Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

D. Gambaran Umum Propinsi Lampung

1. Letak Geografis dan Keadaan Ekonomi

Daerah Propinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km² termasuk pulau-Pulau yang terletak pada bagian paling ujung pulau Sumatera terdiri dari 11 (sebelas) wilayah kabupaten/kota, serta 204 kecamatan dan 2.279 desa, dan merupakan propinsi terpadat diluar pulau jawa dan dibatasi oleh :

1. Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, disebelah utara.
2. Selat Sunda, disebelah selatan

3. Laut Jawa, disebelah timur
4. Samudera Indonesia, disebelah barat

Secara geografis propinsi Lampung terletak pada kedudukan timur- barat berada antara $103^{\circ} 40^1$ sampai $105^{\circ} 50^1$ Bujur Timur, sedangkan pada arah Utara Selatan berada pada $6^{\circ} 45^1 - 3^{\circ} 45^1$ lintang selatan. Letak geografis sedemikian itu menempatkan daerah ini pada posisi yang strategis di pintu gerbang pulau Sumatera dari arah selatan, dan didukung oleh potensi alam yang cukup tersedia. Sarana dan prasarana perhubungan yang memadai diharapkan mampu menarik berbagai investasi pembangunan. Propinsi Lampung terdiri dari lima daerah monografis berbukit sampai bergunung, daerah monografis berombak dan bergelombang, daerah alluvial, daerah pasang surut serta daerah aliran sungai.

- a. Daerah monografis berbukit sampai bergunung dengan kelerengan rata-rata 30% dan ketinggian 300 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak dibagian sebelah barat yang meliputi sebagian terbesar punggung bukit barisan dengan tonjolan utama gunung Tanggamus, pasawaran, Bukit Agung, Bukit Pesagi dan Bukit Sekincau, serta tonjolan yang terpisah adalah Raja Basa dengan rata-rata ketinggian 1500 m diatas permukaan laut. Daerah ini sebagian ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.
- b. Daerah monografi berombak sampai bergelombang terdiri dari bukit-bukit rendah yang diselingin dengan dataran-dataran sampai dengan kemiringan antara 8-15 % dan ketinggian rata-rata 300-500 meter diatas permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan daerah dataran alluvial,

dengan vegetasi tanaman pertanian lahan kering seperti jagung serta berbagai sejenis tanaman palawija lainnya. Daerah ini meliputi daerah Gedong Tataan, Kedondong, Sukoharjo, Pulau Panggung, Kalirejo, Bangunrejo

- c. Daerah alluvial meliputi sebagian besar Lampung Tengah sampai mendekati pantai disebelah timur, juga bagian hilir dari sungai besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, Way Seputih serta Mesuji, ketinggian daerah ini berkisar antara 20-75 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan 0-3% pada bagian pantai sebelah barat, daerah ini menyempit menurut arah bukit Barisan
- d. Daerah dataran rawa pasang surut terdapat disepanjang pantai timur yang merupakan daerah rawa genangan banjir dan pasang surut dengan ketinggian 0,5-1 meter di atas permukaan laut. Vegetasi utama adalah hutan sekunder terutama hutan rawa yang beroperasi besar untuk direklamasi sebagai areal lahan sawah pasang surut dan pertambakan Daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh sungai-sungai utama yaitu Way Tulang Bawang, Way Seputih, Way Sekampung, Wy Semangka, Way Jepara dan daerah aliran sungai-sungai kecil lainyayang meliputi luas lebih kurang 25.700 km² dengan panjang sungai mencapai 2.639 km dengan 37 cabang sungai. Daerah aliran sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai sentra pengembangan industri pertanian yang mengolah hasil pertanian yang akan meningkat, pengembangan industri non pertanian yang berorientasi ekspor.

Lampung merupakan suatu daerah geografis yang sangat berpotensi baik untuk pengembangan sawah pengairan, pertanian pangan lahan kering, perkebunan dan berbagai peternakan dan perikanan. Potensi ini terlihat dari semakin

berkembangnya lokasi sawah beririgasi teknis, lahan reklamasi rawa, berbagai usaha serta usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar milik pemerintah dan juga swasta, serta berbagai jenis kegiatan usaha tambak yang sangat potensial di pantai timur Lampung.

2. Keadaan Penduduk Provinsi Lampung

Keadaan penduduk provinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6 : Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2004-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Juta Jiwa	Pertumbuhan (%)
2004	6.915.950	-
2005	7.116.177	2,89
2006	7.211.586	1,34
2007	7.289.767	1,08
2008	7.391.128	1,39
Rata-rata		1,34

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2009

Tabel 6 memperlihatkan laju pertumbuhan jumlah penduduk Propinsi Lampung yaitu rata-rata sebesar 1,34 persen per tahun. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2004-2008 dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 mencapai 2,89 persen terkecil terjadi pada tahun 2007 sebesar 1,08 persen. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun maka akan berpengaruh terhadap pola penggunaan tanah. Hal ini disebabkan karena pola penggunaan tanah merupakan hasil dari kegiatan penduduk yang ada diatas.

3. Potensi Ekonomi

Kegiatan perekonomian Lampung yang diperoleh dari data statistik dibagi kedalam beberapa sektor yang ada antara lain pertanian. Sektor pertanian mencakup kegiatan perusahaan dan pemanfaatan makhluk biologis untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai bahan baku dalam proses produksi. Kegiatan tersebut meliputi bercocok tanam, pemeliharaan ternak, budidaya dan penangkapan ikan, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan, pemburuan binatang liar kegiatan jasa pertanian.

a. Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan, dan pemungutan hasil pertanian tanaman bahan makanan. Jenis komoditas yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.

b. Tanaman Perkebunan

Subsektor ini meliputi kegiatan perusahaan tanaman perkebunan. Komoditas yang dihasilkan meliputi kopi, cengkeh, lada, kakao, jahe kapuk, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, pala, vanili, tebu, serta tananaman perkebunan.

c. Peternakan dan hasil-hasilnya

Subsektor ini meliputi kegiatan pembibitan, serta budidaya jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk mengambil hasilnya. Komoditas yang dihasilkan antara lain sapi, kebau, kambing, babi, kuda, ayam, itik, sapi perah, serta hasil ternak seperti telur, susu, dan bulu.

d. Kehutanan

Subsektor ini meliputi kegiatan penebangan kayu : pengambilan getah daun, akar, kulit kayu, bambu rotan, dan kayu yang ditanam di areal non hutan.

e. Perikanan

Subsektor ini meliputi kegiatan penangkapan, serta pembudidayaan segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang diusahakan di perairan tawar maupun air asin. Komoditas hasil perikanan antara lain adalah ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya, ikan banding dan jenis ikan lunak lainnya, rumput laut dan tumbuhan laut lainnya.

IV. PEMBAHASAN

A. Efisiensi Alokasi APBD Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Analisis efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pertanian dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek pemerintah Provinsi Lampung dibidang pertanian yang sangat menentukan arah dan hasil pembangunan yang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan Provinsi Lampung itu sendiri yang dilihat dari PDRB sektor pertanian. Dikategorikan efisien, apabila analisis yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil analisis efisien bearti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efisien atau tidak efisien. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dari pada pendapatan yang diterima (Tri Suprpto, 2007 : 86).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran (belanja daerah)}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7 : Hasil Perhitungan nilai Efisiensi Alokasi APBD Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008.

Tahun	Pendapatan Sektor Peranian (Rp)	Pengeluaran Sektor Pertanian (Rp)	Efisiensi (%)
2004	2.177.850	7.891.425.449	36,23
2005	382.714.038	15.983.711.380	41,76
2006	351.225.739	27.034.888.514	76,98
2007	375.004.600	35.282.200.607	94,08
2008	403.075.626	36.968.663.064	91,72
Rata-rata			68,15

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2009 (data diolah)

Pada Tabel 7 memperlihatkan hasil perhitungan efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian dari tahun anggaran 2004-2008 berdasarkan kriteria kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

Tahun 2004 = 36,23 %.....sangat efisien

Tahun 2005 = 41,76 %.....sangat efisien

Tahun 2006 = 76,98 %.....efisien

Tahun 2007 = 94,08 %.....kurang efisien

Tahun 2008 = 91,72 %.....kurang efisien

Pada Tabel 7 menunjukkan kinerja pemerintahan daerah cukup baik, karena analisis efisiensi bekisar antara 36,23 % sampai dengan 91,72 %. Terlihat jelas Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 memperlihatkan bahwa analisis efisiensi sektor pertanian Provinsi Lampung setiap tahunnya semakin jauh dari 100%. Hal ini bearti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pertanian semakin efisien. Hanya saja untuk Tahun 2007 dan Tahun 2008 kinerja pemerintah tidak begitu baik. Hal ini terlihat jelas tahun 2007-2008 dapat

dikategorikan kurang baik karena hasil perhitungan memperlihatkan bahwa analisis efisiensi semakin dekat dengan 100%. Pada tahun 2004, analisis efisiensi sebesar 36,23%, pada tahun ini biaya pengeluaran sektor pertanian yang dikeluarkan pemerintah daerah adalah sebesar Rp.7.891.425.449 sedangkan realisasi pendapatan yang diterima sektor pertanian sebesar Rp.2.177.850 menunjukkan pengeluaran yang sangat efisien. Tahun 2005 analisis efisiensi sebesar 41,76%, biaya pengeluaran sektor pertanian yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk tahun 2005 sebesar Rp.15.983.711.380 sedangkan pendapatan yang yang diterima sektor pertanian sebesar Rp.382.714.038 menunjukkan pengeluaran yang sangat efisien. Ditahun 2006 analisis efisiensi sebesar 76,98% biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pertanian sebesar Rp.27.034.888.514 sedangkan pendapatan yang diterima oleh sektor pertanian sebesar Rp.351.225.739 menunjukkan pengeluaran yang efisien. Pada tahun 2007 dan 2008 analisis efisiensi masing-masing sebesar 94,08% dan 91,72% menunjukkan pengeluaran yang kurang efisien, hal ini disebabkan karena pendapatan sektor pertanian Provinsi Lampung mengalami penurunan.

Selama lima tahun anggaran 2004-2008 dana pengeluaran sektor pertanian yang harus dikeluarkan memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan sektor pertanian yang mengalami naik dan turunnya pendapatan sektor pertanian.

Analisis efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pertanian Provinsi Lampung semakin kurang dari 100% per rata-rata setiap tahunnya sebesar 68,15%. Dari kriteria kinerja keuangan yang ada menunjukkan

bahwa persentase kinerja keuangan berada daiantar 60%-80% sehingga dikategorikan efisien. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan efisien dalam melakukan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , dan bearti bahwa pemerintahan daerah Provinsi Lampung telah mencapai sasaran pelaksanaan otonomi daerah dimana sasaran otonomi daerah adalah mengupayakan keuangan daerah yang efisien. Pemerintah daerah Provinsi Lampung khususnya disektor pertanian bearti telah cukup berhasil menyusun keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pendekatan kinerja keuangan.

Pada Tabel 8 dapat dilihat peranan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dengan efisiensi pengeluaran sektor pertanian Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 8 : Peranan Hasil Efisiensi Pengeluaran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008.

Tahun	Hasil Efisiensi Pengeluaran Sektor Pertanian (%)	Kriteria	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004	36,23	Sangat Efisien	4,67
2005	41,76	Sangat Efisien	5,39
2006	76,98	Efisien	5,52
2007	94,08	Kurang Efisien	4,42
2008	91,72	Kurang Efisien	4,44

Anggaran belanja daerah sektor pertanian merupakan aktifitas pemerintah dlam berbagai sektor antara lain sektor pertanin. Untuk menilaiakeberhasilan suatu daerah salah satu indikator yang digunakan adalah besarnya PDRB. Dalam pertumbuhan ekonomi bahwa untuk meningkatkan pendapatan perkapita daerah (PDRB) harus dilibatkan berbagai faktor produksi (sumber-sumber ekonomi)

dalam setiap kegiatan produksi. Pada tabel 8 memperlihatkan bahwa peranan hasil pengeluaran (belanja) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian Provinsi Lampung. Pada tahun 2004 efisiensi pengeluaran sektor pertanian dikategorikan sangat efisien sebesar 36,23 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,67 persen. Tahun 2005 efisiensi pengeluaran sektor pertanian dikategorikan sangat efisien sebesar 41,76 persen, dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 5,39 persen sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,72 persen. Untuk tahun 2006 efisiensi pengeluaran sektor pertanian dikategorikan efisien sebesar 76,98 persen, hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pun mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2004-2006 kinerja pemerintahan semakin baik karena pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Tahun 2007 dan tahun 2008 efisiensi pengeluaran sektor pertanian masing-masing dikategorikan kurang efisien dengan masing-masing sebesar 94,08 persen dan 91,72 persen dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian masing-masing sebesar 4,42 persen dan 4,44 persen, hal ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 1,10 persen sedangkan tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami kenaikan.

Penyebab kurang efisiennya alokasi pengeluaran sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2007-2008 yaitu :

1. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan hasil produksi sektor pertanian.

2. Masih belum optimalnya tingkat profesionalisme dalam mengelola keuangan daerah, sehingga terjadinya pemborosan keuangan daerah.
3. Penyaluran anggaran yang tidak sinergis dengan musim tanam dan terjadinya fenomena iklim yang tidak menentu seperti banjir dan kekeringan.
4. Masih lemahnya permodalan untuk petani, serta transfer teknologi yang masih lambat.
5. Dalam penyaluran benih bantuan masih belum dilakukannya secara tepat dalam penyaluran benih itu sendiri, dan penggunaan benih unggul baru mencapai 45-50%, belum optimalnya dalam penggunaan benih unggul dan belum optimalnya penggunaan pupuk organik.

B. Langkah-Langkah Meningkatnya Efisiensi APBD Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian

1. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti kinerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja dan tempat kerja serta adanya ketersediaan dana. Maksudnya perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kerja yang optimal sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas dengan baik. Hal ini tentu saja didukung dengan adanya ketersediaan dana untuk peningkatan pengadaan fasilitas peralatan kerja dan tempat kerja namun dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan dalam pengelola lahan-lahan pertanian yang dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Seperti tersedianya peralatan dan mesin-mesin pertanian, pupuk dan

benih yang berkualitas sehingga menghasilkan produksi yang baik. Terutama pada tanaman pangan dari tahun 2004-2008 hasil produksinya selalu meningkat.

3. Faktor teknologi dalam pekerjaan/tugas cukup memadai guna melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas secara optimal sehingga meningkatkan efisiensi alokasi APBD. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya alat-alat kantor yang lebih modern seperti komputer dalam jumlah yang cukup.
4. Faktor pengalokasian anggaran pertanian didasarkan atas skala prioritas yang ditetapkan, terutama untuk program yang ditunjukkan pada upaya peningkatan hasil produksi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian pengalokasian anggaran sudah dilakukan secara efisien pada proyek-proyek pertanian.
5. Faktor pemimpin dalam arti kemampuan dalam mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berbaya guna dan berhasil guna untuk percepatan pencapaian/tujuan.

C. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung

Kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung diperoleh dari nilai tambah PDRB sektor pertanian dari berbagai jenis komoditas yang dihasilkan oleh pertanian di Provinsi Lampung guna meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung.

Dalam hal ini kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung sangat diharapkan, peranan PDRB sektor pertanian sangat besar peranannya dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Sektor Pertanian terbagi menjadi lima subsektor yaitu subsektor Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan subsektor perikanan. Untuk melihat persentase kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 9 dibelakang ini :

Tabel 9 : Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2004-2008

Tahun	PDRB Sektor Pertanian (Rp)	PDRB Provinsi Lampung (Rp)	Peranan (%)
2004	11.951.916.000	28.262.289.000	42,29
2005	12.509.837.000	29.397.248.000	42,55
2006	13.184.537.000	30.861.360.000	42,72
2007	13.912.097.000	32.694.890.000	42,55
2008	14.528.048.000	34.414.653.000	42,21
Rata-rata			42,47

Sumber : Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009 (data diolah)

Tabel 9 di atas dapat diketahui kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap Provinsi Lampung dari tahun 2004-2008, terlihat rata-rata peranan PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung adalah sebesar 42,47 persen. Pada tahun 2004 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung sebesar Rp. 11.951.000. Kemudian meningkat pada tahun 2005 sampai 2008 masing-masing sebesar, tahun 2005 Rp. 12.509.837.000, tahun 2006 Rp 13.184.537.000, 2007 Rp. 13.912.097.000, dan tahun 2008 Rp. 14.528.048.000. Persentase peranan PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2004 sebesar 42,29 persen, kemudian meningkat pada tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing sebesar 42,55 persen dan 42,72 persen. Tahun 2007

dan 2008 mengalami penurunan masing-masing sebesar 42,55 persen dan 42,21 persen. Penurunan ini terjadi karena pada tahun tersebut penyaluran anggaran tidak sinergis dengan musim tanam distribusi pupuk tidak lancar, terjadinya iklim (banjir, kekeringan), transfer teknologi masih lambat, dan penggunaan pupuk organik belum optimal.

D. Kinerja Produksi Tanaman Pangan Pertanian Provinsi Lampung

Selama kurun waktu Tahun 2004-2008 pembangunan Sektor Pertanian memperlihatkan memuaskan. Produksi tanaman pangan ubi kayu dengan rata-rata produksi pada lima tahun ini sebesar 108,16 persen, yang diikuti oleh komoditas tanaman pangan jagung dengan rata-rata sebesar 99,44 persen. Sedangkan komoditas tanaman pangan untuk padi, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau dengan rata-rata produksi sebesar 99,06 persen, 90,18 persen, 86,42 persen, dan 74,00 persen. Komoditas tanaman pangan kedelai dengan rata-rata produksi terkecil dalam lima tahun ini sebesar 56,26 persen.

Dengan meningkatnya berbagai produksi pertanian maka berdampak pula dengan pertumbuhan PDRB sektor pertanian. Pada tahun 2004 pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 4,67 persen. Dan tahun 2005 sampai tahun 2008 pertumbuhan sektor pertanian dengan masing-masing sebesar 5,39 persen, 5,52 persen, 4,42 persen dan 4,44 persen. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut terdiri dari sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis efisiensi alokasi pengeluaran daerah sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian Provinsi Lampung selama lima tahun anggaran dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 rata-rata sebesar 68,15%. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pun dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2007 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan naik lagi pada tahun 2008 walau tahun 2008 masih dikategorikan kurang efisien dalam persentase kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian Provinsi Lampung dari tahun ketahun semakin efisien. Karena biaya yang dikeluarkan semakin proposional dengan pendapatan yang didapatkan. Dengan demikian kinerja pemerintahan sektor pertanian daerah Provinsi Lampung dalam mengelola keuangannya semakin baik. Walaupun setiap tahunnya biaya anggaran pengeluaran sektor pertanian mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan sektor pertanian, karena untuk tahun 2007 pendapatan pertanian mengalami penurunan, dan naik lagi pada tahun 2008.

2. Efisiensi alokasi pengeluaran sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian Provinsi Lampung dikatakan efisien dikarenakan faktor sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kerja yang optimal, adanya peralatan kerja dan ketersediaan dana, pupuk dan benih yang berkualitas sehingga menghasilkan produksi yang baik, Faktor teknologi secara optimal, faktor pengalokasian anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Penyebab kurang efisiennya alokasi pengeluaran sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2007-2008 dikarenakan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan hasil produksi, belum optimalnya tingkat profesionalisme dalam mengelola keuangan daerah, penyaluran dana belum sinergis dengan musim tanam sehingga terjadinya banjir dan kekeringan, lemahnya permodalan untuk petani, dalam penyaluran benih belum dilakukan secara tepat.

3. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung dari tahun ketahun dengan rata-rata peranan sebesar 42,47 persen pertahun. Hal ini menunjukkan stabilnya jumlah penerimaan yang diperoleh dari sektor pertanian dalam perannya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Sektor pertanian dibagi 5 subsektor yang mana masing-masing subsektor menyumbangkan hasil komoditasnya ke perekonomian Lampung, dengan mutu produksi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan penerimaan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung yang memiliki nilai yang positif.

B. Saran

Agar alokasi pengeluaran sektor pertanian Provinsi Lampung terhadap peningkatan PDRB Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara efisien maka :

1. Sebaiknya anggaran yang ada harus berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. Maksudnya pengeluaran-pengeluaran tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya : biaya untuk permodalan petani, pembelian alat-alat mesin pertanian yang canggih, serta pemerataan dalam penyaluran benih dengan varietas unggul bermutu dan lain-lain.
2. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang ditetapkan baik nasional maupun wilayah. Tidak hanya sekedar pemerataan serta kemampuan daerah dalam menyelesaikan kegiatan. Serta secara aktif melakukan monitoring atas kegiatan-kegiatan di daerah yang dibiayai melalui dana APBD.
3. Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan untuk mendorong terjadinya peningkatan pendapatan PDRB sektor pertanian dengan hasil komoditas pertaniannya. Secara khusus kebijakan yang harus dibuat adalah untuk hasil pertanian yaitu berupa penerapan standarisasi mutu, standarisasi mutu dapat dilakukan perbaikan pada masa pra panen, panen dan pasca panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri. 1996. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan*. Fokus Media.
- _____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Fokus Media.
- _____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 2004. Fokus Media.
- Departemen Pertanian. 2009. *Evaluasi Kegiatan Strategis Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009*. Jakarta
- Djayasinga, Marselina. 2006. *Ekonomi Publik Suatu Pengantar (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Devas, N. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Pakir di Kabupaten Sleman*. Skripsi Sarjana Facultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Jakarta.
- Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2009. *Lampung Dalam Angka*. Lampung.
- Keputusan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus Media.
- Kurniawati. 2006. *Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2004*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Munir, Dasril, Henry Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 1998. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Sukirno Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Fakultas Ekonomi, UI. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Suprpto, Tri. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Trapsilo, Budi. 2004. *Analisis Kontribusi Subsektor Perkebunan (Komoditas Kopi) Terhadap PDRB Provinsi Lampung*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung. Bandar Lampung.

